



Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 05 Agustus 2011

Halaman: 13

CPNS

Penerimaan Belum Jelas

UMBULHARJO - Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2011 di lingkungan Pemkot Jogja belum jelas. Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kota Jogja Drs Tri Widayanto tidak bisa memastikan ada atau tidaknya penerimaan CPNS tahun ini.

Kepastiannya masih harus menunggu moratorium CPNS oleh Mendagri Gamawan Fauzi. Keputusan diambil berdasarkan perhitungan alokasi pembiayaan APBD, khususnya untuk belanja pegawai.

Ini mengibgat beberapa daerah di Indonesia "terancam bangkrut". Sebab, alokasi APBD ada yang sekitar 70 persen untuk membayar gaji pegawai.

"Kami masih menunggu keputusan Mendagri maupun Men-PAN untuk menentukan apakah tahun ini diadakan atau tidak rekrutmen CPNS. Kami juga belum jelas tentang alokasi pembiayaan APBD untuk gaji PNS, apakah Kota Jogja termasuk atau tidak," terang Tri kemarin.

Menurut Tri, data PNS yang masuk dan keluar belum berimbang. Dalam kurun waktu 2006-2010 jumlah PNS yang keluar mencapai 1.693 orang. Sedangkan PNS baru kurun waktu yang sama ada 646 orang.

Perbandingan tersebut tidak bisa dijadikan ukuran. "Kami menggunakan analisa jabatan terhadap masing-masing SKPD. Kebijakan pemenuhan tiap SKPD paling hanya 60-70 persen pasti mereka mengalami kekurangan. Maka kami memang benar-benar selektif dalam penerimaan CPNS," kata Tri.

► Baca Penerimaan... Hal 23

IPK Wajib 3,00 dan Kuasai Komputer

PENERIMAAN...
Sambungan dari hal 13

Dalam tahun ini, BKD Kota Jogja sudah mengajukan usulan CPNS berjumlah 465 orang. Usulan sudah dimasukkan sejak Juli.

"Tapi mungkin seperti tahun-tahun lalu jumlah yang disetujui jauh dari usulan. Kami akan

urutan sesuai skala prioritas kebutuhan mendesak, akan lebih banyak tenaga teknis yang dibutuhkan. Tapi itu juga masih menunggu kejelasan dari pusat ada tidaknya rekrutmen CPNS," jelasnya.

Seperti tahun 2010 lalu, BKD Jogja juga akan menerapkan standar tinggi. Paling tidak syarat CPNS harus memiliki IPK 3,00 dan berasal dari per-

guruan tinggi berakreditasi B. Selain itu, mereka mesti lancar berbahasa Inggris dan menguasai komputer.

"Dari evaluasi memang terlihat kinerja mereka memang bagus. Jadi sudah memiliki basic SDM yang unggul untuk masa depan. Banyak kritikan yang kami terima dari masyarakat, tapi ini kompetisi. Kami ingin mendapat SDM yang benar-benar berkualitas," jelas Tri.

BKD sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat tentang usulan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Usulan dilayangkan sejak tahun lalu. Namun, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah. Saat ini ada sekitar 500 tenaga honorer dan 8.200 PNS di lingkungan Pemkot Jogja. (c10)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005